

halaman sengaja dikosongkan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Perkembangan pasar modal saat ini tidak kalah pesat dibandingkan perkembangan teknologi. Pasar modal saat ini telah menjadi penentu untuk perkembangan ekonomi di suatu negara dan merupakan salah satu sumber alternatif pendanaan baik bagi pemerintah maupun swasta. Di Indonesia terdapat beberapa perusahaan yang menerbitkan obligasi/efek kepada masyarakat umum perusahaan tersebut sering disebut dengan Perusahaan Publik. Perbedaan antara perusahaan publik yang menjual sahamnya di Bursa Efek Indonesia terdapat pada kata Tbk yang ada di akhir nama perusahaan. Bagi perusahaan yang memiliki Tbk di akhir, maka dapat dipastikan bahwa saham perusahaan tersebut dijual di Bursa Efek Indonesia. Tujuan dari penjualan saham tersebut ialah agar mendapatkan dana eksternal dari pihak lain dan juga mencari tata kelola yang baik dan transparan di mata masyarakat. Bagi para investor, mereka akan mendapatkan dividen sesuai dengan persentase kepemilikannya. Dengan adanya Perusahaan *Go Public*, maka laporan keuangan perusahaan dapat diakses oleh masyarakat umum yang dijadikan sebagai alat untuk menentukan perusahaan mana yang akan didanai. Tata kelola perusahaan dapat dijadikan tolak ukur bagi masyarakat yang akan berinvestasi. Tata kelola perusahaan yang baik dinilai memiliki nilai tambah bagi investor karena dinilai dapat menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan fakta yang ada.

Bursa Efek Indonesia saat ini telah mengelompokkan perusahaan menjadi beberapa sektor yaitu pertanian, pertambangan, industri dasar dan kimia, aneka industri, industri barang konsumsi, properti real estat dan konstruksi bangunan, infrastruktur utilitas dan transportasi, finansial, perdagangan jasa dan investasi. Dari keberagaman sektor yang ada, penelitian ini akan berfokus pada sektor properti, real estate dan konstruksi bangunan. Sektor properti, real estat dan konstruksi bangunan sendiri

terbagi atas sub sektor properti dan real estate, sub sektor konstruksi bangunan serta sub sektor lainnya. Dalam PSAK No. 13, properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai (oleh pemilik atau *lessee*/penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya. Menurut PSAK No.44, mengatakan bahwa pengembangan *real estate* adalah kegiatan perolehan tanah untuk kemudian dibangun perumahan/komersial/industri.

Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa perkembangan industri properti di Indonesia akan memberikan dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional karena memiliki keterkaitan dengan bidang lainnya. Pengaruh yang ditimbulkan secara searah sehingga jika perkembangan sektor konstruksi dan properti naik, maka pengaruhnya ke sektor lain juga besar, seperti material, industri logistik, jasa, hingga keuangan dan perbankan. Selain itu, perkembangan sektor industri properti juga akan menciptakan lapangan kerja sehingga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sektor properti, real estat, dan konstruksi bangunan merupakan sektor yang bersifat jangka panjang dan akan terus berkembang seiring pertambahan jumlah penduduk yang akan mempengaruhi kebutuhan manusia akan tempat tinggal. Selain itu, kenaikan harga tanah dan bangunan akan menarik investor untuk melakukan investasi. Dengan beberapa kondisi diatas, tentu menjadikan sektor properti, real estat dan konstruksi bangunan memiliki nilai investasi yang tinggi. Dalam hal ini, investor memerlukan informasi mengenai keadaan perusahaan yang akan dipilihnya untuk melakukan investasi. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk dijadikan sebagai acuan dalam melakukan investasi adalah laporan keuangan karena memiliki informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, integritas laporan keuangan merupakan salah satu faktor penting bagi investor, dan pihak eksternal

lainnya sebagai pemakai laporan keuangan sehingga tidak salah membuat keputusan dalam melakukan investasi terhadap suatu perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis memilih objek dalam penelitian ini yaitu perusahaan publik sektor properti, real estat, dan konstruksi bangunan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2014-2018. Data penelitian didapatkan dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan yang diperoleh melalui Bursa Efek Indonesia. Perusahaan sektor properti, real estat, dan konstruksi bangunan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 adalah sebanyak 52 perusahaan.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Perekonomian Indonesia tidak dapat berjalan sendirinya, terdapat pihak pihak bersangkutan yang dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satu penentu dalam perekonomian Indonesia adalah perusahaan publik yang menjual saham, surat hutang serta transaksi derivatifnya yang terjadi pada *Indonesia Stock Exchange (IDX)*. Perusahaan publik yang tersedia dibagi atas sembilan sektor yang salah satu sektornya adalah sektor properti, real estat, dan konstruksi bangunan. Untuk menaikkan perekonomian Indonesia, maka perusahaan juga membutuhkan dana untuk keberlangsungan usahanya. Perusahaan publik memiliki cara sendiri dalam memperoleh dananya yaitu dengan memberikan kinerja yang baik pada laporan keuangan serta laporan tahunan sehingga investor ingin melakukan investasi. Dengan adanya kegiatan pendanaan tersebut, maka perusahaan publik memiliki persaingan ketat baik perusahaan dengan sektor yang sama maupun sektor yang berbeda.

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan (Hery, 2016). Menurut PSAK 1, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan perusahaan merupakan bahasa bisnis yang berisi

kondisi perusahaan baik secara finansial maupun non finansial. Laporan keuangan yang baik harus mencantumkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya pada laporan keuangannya. Tujuan laporan keuangan yang tertulis didalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusannya.

Financial Accounting Standard Board (FASB) dalam *Statement of Financial Accounting Concept* No.2 (SFAC No.2) menjelaskan bahwa integritas laporan keuangan yang wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain dalam suatu entitas. Tujuan dari pernyataan tersebut adalah tidak lain untuk membantu para investor dan kreditur dalam mempertimbangkan risiko dan tingkat pengembalian perusahaan. Berdasarkan pengertian diatas, SFAC memberikan karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu *relevance* dan *reability*. Integritas yang bersifat diandalkan memiliki tiga komponen yaitu, *verifiability*, *representational faithfulness*, dan *neutrality*. Suatu laporan keuangan karakteristik yang dapat diartikan bahwa laporan keuangan harus dapat diandalkan kualitasnya sesuai dengan kenyataan, dapat diverifikasi kebenarannya, bersifat netral tidak memihak kepada siapapun, serta merupakan representasi yang terpercaya. Untuk menilai tingkat integritas laporan keuangan dapat menggunakan konservatisme.

Konservatisme terdapat dalam Glosarium Pernyataan Konsep No.2 FASB (*Financial Accounting Standards Board*) yang mengartikan konservatisme sebagai reaksi yang hati-hati (*prudent reaction*) dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat pada perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan resiko dalam lingkungan bisnis yang sudah cukup dipertimbangkan. Konservatisme lebih menekankan pada kehati-hatian dalam merespons ketidakpastian masa depan, sehingga informasi yang disajikan didalam laporan keuangan bebas dari kesalahan yang material (Lubis, Fujianti, dan Amyulianthy, 2018). Dengan adanya prinsip ini menyebabkan munculnya tindakan ketidakjujuran yang mempengaruhi integritas laporan keuangan dan akan berdampak kepada investor.

Namun, pada saat ini prinsip konservatisme sudah tidak digunakan dikarenakan banyaknya pro dan kontra yang dihasilkan dalam penggunaan prinsip konservatisme. Rivandi & Sherly (2019) menyatakan bahwa disatu sisi, konservatisme akuntansi dianggap sebagai kendala pada kualitas laporan keuangan, dengan adanya prinsip konservatisme akuntansi maka laporan keuangan perusahaan yang diungkapkan akan bersifat bias dan tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Di sisi lain, konservatisme akuntansi dianggap bermanfaat untuk menghindari perilaku oportunistik manajer yang berhubungan dengan kontrak yang menggunakan laporan keuangan. Oleh karena itu, prinsip konservatisme kemudian diganti dengan *prudence* atau kehati-hatian yang penilaiannya lebih ke arah *current value*. Pada dasarnya *prudence* hampir sama dengan konservatisme akuntansi, hanya saja lebih menekankan pada kehati-hatian dalam pelaksanaan penilaian yang dibutuhkan untuk membuat perkiraan yang akan sangat diperlukan ketika berada pada kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau pendapatan tidak akan dilebih-lebihkan serta kewajiban atau pengeluaran juga tidak berlebihan

Pada penelitian ini, konservatisme tetap digunakan untuk mengetahui dan mengidentifikasi apakah perusahaan yang berada di sektor properti, real estat, dan konstruksi bangunan masih mengalami tingkat konservatisme atau tidak, walaupun peraturan yang berlaku telah berubah menjadi *prudence concept*.

Salah satu kasus yang melibatkan integritas laporan keuangan yaitu PT. Hanson Internasional Tbk yang melakukan pelanggaran mengenai integritas laporan keuangan pada tahun 2016 silam. PT. Hanson Internasional Tbk tidak mengungkapkan perjanjian Pengikatan Jual Beli Kavling Siap Bangun di Perumahan Serpong Kencana tertanggal 14 Juli 2016 (PPJB 14 Juli 2016) mengenai penjualan Kasiba senilai Rp 732. Tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas integritas laporan keuangan yaitu perusahaan tidak melaporkan kenyataan yang terjadi pada laporan keuangan. Atas kejadian tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan sanksi denda kepada Direktur Utama PT. Hanson Internasional Tbk (MYRX) Benny Tjokro sebesar 5 miliar. Selain Direktur Utama, OJK juga menetapkan perseroan PT Hanson Internasional melakukan pelanggaran karena tidak mengungkapkan hal tersebut sehingga harus

mendapatkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 500 juta dan perintah tertulis untuk melakukan perbaikan dan penyajian kembali atas Laporan Keuangan Tahunan. Direktur PT Hanson Internasional dan Akuntan Publiknya pun tak luput dari sanksi. Sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100 juta dikenakan kepada Adnan Tabrani selaku direktur dan Sherly Jokom selaku Akuntan Publik dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama 1 tahun (msn.com).

Kasus lainnya adalah PT. Waskita Karya yang melakukan kelebihan pencatatan proyeksi pendapatan proyek tahun depan sebagai pendapatan tertentu sebesar 500 miliar. Kasus ini terungkap saat adanya pergantian direksi pada tahun 2008. Direksi sebelumnya terbukti telah melakukan rekayasa laporan keuangan selama tahun 2004-2008. Rekayasa laporan keuangan ini merupakan salah satu bentuk ketidak jujuran yang merupakan pengertian dari integritas laporan keuangan. Selain itu pada tahun 2013 PT. Bakrieland Development Tbk tidak mengungkapkan kewajiban jangka panjangnya sebesar US\$ 155 Juta dan tidak dapat membayarnya saat jatuh tempo. Integritas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang menampilkan kondisi suatu perusahaan sebenarnya, tanpa ada yang ditutup-tutupi atau disembunyikan (Hardiningsih, 2010)

Kasus manipulasi yang terjadi biasanya melibatkan campur tangan *Chief Executive Officer* (CEO), dewan komisaris, komite audit, internal auditor, dan eksternal audit. Sehingga, struktur tata kelola yang baik akan meminimalisir terjadinya manipulasi yang dikehendaki oleh petinggi perusahaan. Untuk menciptakan perusahaan yang efektif dan efisien serta meminimalisir adanya kemungkinan tindakan manipulasi, *Corporate governance* merupakan alat terpenting yang dapat digunakan (Vera, 2017). Aspek pertama *corporate governance* adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, bank, dan lembaga lainnya baik didalam maupun luar negeri. Kepemilikan institusional pada perusahaan akan berpengaruh pada tingkat pengawasan saat menyusun laporan keuangan sehingga akan memperkecil kemungkinan manajemen melakukan manipulasi

laporan keuangan. Berdasarkan penelitian Fajaryani (2015) kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dikemukakan oleh Istiantoro, dkk (2017) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Kepemilikan manajerial sebagai aspek kedua dari *corporate governance* memiliki definisi kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen (manajer, direksi, atau komisaris) atau dengan kata lain manajer sebagai pemegang saham perusahaan (Christiningrum dan Aisyah, 2014). Dengan adanya kepemilikan manajerial, manajemen akan lebih meningkatkan kinerjanya untuk mendapatkan hasil yang baik bagi perusahaan yang kemudian akan berdampak pada dirinya sendiri sebagai pemegang saham, Berdasarkan penelitian Putra I, dkk (2019) kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan berbeda halnya dengan penelitian Sari dan Hapsari (2018) yang berpendapat bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Aspek ketiga yang mempengaruhi integritas laporan keuangan adalah komite audit. Berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan No. 55/POJK.04/2015 pengertian komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Dalam pelaksanaannya, komite audit melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, pelaksanaan internal dan eksternal sesuai standar yang berlaku. Dengan adanya komite audit, laporan keuangan akan bersifat transparan, terbuka, adil serta pengungkapan informasi yang sesuai sehingga akan memperkecil resiko manipulasi laporan keuangan. Berdasarkan penelitian Mudasetia dan Solikhah (2017) komite audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini berbeda dengan penelitian Amrulloh, dkk (2016) bahwa komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Aspek terakhir dari *corporate governance* adalah komisaris independen. Komite Nasional Kebijakan Governance mendefinisikan dewan komisaris sebagai bagian dari organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG, namun demikian dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Menurut peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik, dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai emiten atau perusahaan publik maupun usaha emiten atau perusahaan publik, dan memberi nasihat kepada direksi. Keberadaan komisaris independen akan mempengaruhi baik buruknya kinerja perusahaan yang akan berdampak pada struktur tata kelola perusahaan dan integritas laporan keuangan. Berdasarkan penelitian Dewi dan Putra (2016) komisaris independen berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini berbeda dengan penelitian dari Amrulloh, dkk (2016) yang menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Selain *corporate governance*, faktor lain yang dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan adalah *financial distress*. Menurut Sulastri dan Anna (2018) *financial distress* dapat diartikan sebagai gejala awal kebangkrutan akibat penurunan kondisi keuangan yang dialami oleh suatu perusahaan. Semakin besar kewajiban perusahaan maka semakin besar juga potensi perusahaan mendapatkan *financial distress*. Perusahaan yang mengalami *financial distress* mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja manajemen yang buruk sehingga akan mengalami pergantian manajemen dan mempengaruhi tingkat konservatisme yang dibutuhkan dalam integritas laporan keuangan. Manipulasi data akuntansi cenderung dilakukan oleh manajer ketika perusahaan mengalami *financial distress* yang akan mempengaruhi tingkat integritas laporan keuangan. Menurut penelitian yang dilakukan Indrasari dkk (2016) bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap integritas

laporan keuangan. Perusahaan tetap menyajikan laporan keuangannya secara relevan walaupun mengalami *financial distress*. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Fathurahmi dkk (2015) dan Noviantari dan Ratnadi (2015) yang menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi.

Ukuran perusahaan merupakan faktor yang mempengaruhi integritas laporan keuangan. Menurut Lubis, dkk (2018) perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar atau kecilnya perusahaan. Perusahaan besar dinilai akan lebih menarik perhatian banyak orang sehingga perusahaan akan berusaha untuk menyampaikan laporan keuangan secara aktual sesuai dengan kenyataannya. Berdasarkan penelitian Verya (2017) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mais dan Nuari (2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Berdasarkan faktor-faktor yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE*, *FINANCIAL DISTRESS*, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI PADA PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTI, REAL ESTAT, DAN KONSTRUKSI BANGUNAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2018)”**

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, permasalahan yang dihasilkan memiliki persamaan yaitu berkaitan dengan penyajian laporan keuangan yang tidak disajikan sesuai dengan apa yang terjadi. Laporan keuangan yang berperan penting dalam menarik masyarakat dan investor dalam berinvestasi menghasilkan perbuatan yang tidak sesuai dengan kode etik oleh kaum-kaum tertentu karena ingin menampilkan laporan keuangan sebaik-baiknya. Berbagai penelitian sebelumnya yang telah dilakukan menghasilkan perbedaan hasil dan faktor yang mempengaruhi

integritas laporan keuangan. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian terdahulu penulis ingin meneliti pengaruh *corporate governance*, *financial distress*, dan ukuran perusahaan terhadap integritas laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diambil beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana *corporate governance*, *financial distress*, dan ukuran perusahaan pada perusahaan sektor properti, real estat, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI periode 2014-2018?
2. Apakah *corporate governance*, *financial distress*, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan sektor properti, real estat, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI periode 2014-2018?
3. Apakah *corporate governance* berpengaruh secara parsial terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan sektor properti, real estat, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI periode 2014-2018?
4. Apakah *financial distress* berpengaruh secara parsial terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan sektor properti, real estat, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI periode 2014-2018?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan sektor properti, real estat, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI periode 2014-2018?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *corporate governance*, *financial distress*, dan ukuran perusahaan pada perusahaan sektor properti, real estat, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI periode 2014-2018

2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan *corporate governance*, *financial distress*, dan ukuran perusahaan pada perusahaan sektor properti, real estat, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial *corporate governance* terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan sektor properti, real estat, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial *financial distress* terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan sektor properti, real estat, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.
5. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial ukuran perusahaan terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan sektor properti, real estat, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, adapun manfaat yang diberikan oleh penelitian ini sebagai berikut:

1.5.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terhadap ilmu pengetahuan akuntansi dan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan integritas laporan keuangan.

1.5.2 Aspek Praktis

a) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan bahan evaluasi dalam menghasilkan laporan keuangan yang memiliki integritas.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan mengenai integritas laporan keuangan sehingga dapat dijadikan pertimbangan baru ketika membuat keputusan

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan tugas akhir terdiri dari 5 bab, yang dirinci sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat serta ruang lingkup penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai landasan teori penelitian serta penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis yang disajikan dalam penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode yang berisi penjelasan variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, penentuan teknik pengumpulan data dan metode analisis data yang akan digunakan.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian secara rinci sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan masalah. Hasil analisis data diinterpretasikan dengan ringkas dan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran yang berhubungan dengan penelitian serupa di masa yang akan datang.